

**RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025**



**Nama Perangkat Daerah:  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KETAPANG**

**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2025 dapat tersusun. Adanya Renja ini maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang telah mempunyai suatu pedoman bagi pelaksanaan kegiatan demi kelancaran pembangunan Kabupaten Ketapang serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Renja disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang tahun 2025 serta bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang tahun 2021-2026 untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja memiliki peranan yang sangat penting, selain sebagai kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan, Renja juga berperan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana kualitas proses penyusunan dan kualitas substansi dokumen ini benar-benar memenuhi pendekatan perencanaan yang efektif dan responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu proses penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Ketapang, Juli 2024  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KAB. KETAPANG



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU .....</b>	<b>7</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.....	8
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.....	26
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	33
<b>BAB III TUJUAN DAN sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN KETAPANG .....</b>	<b>34</b>
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.....	34
3.3. Program dan Kegiatan.....	35
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN KETAPANG .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>56</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang .....	13
Tabel 2.2 Realisasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2023.....	21
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Sampai Dengan Tahun 2023.....	25
Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang .....	30
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.....	33
Tabel 3.1 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2025 .....	35
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah ..... 2

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

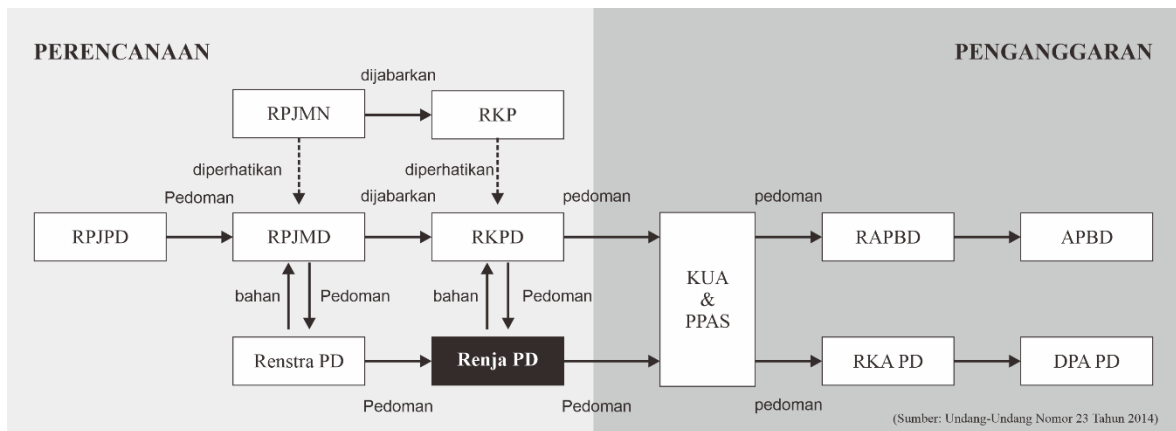
### **1.1. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renja adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan tahapan awal dalam perencanaan penganggaran. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, subkegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 mengacu pada rumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang tahun 2025 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD

dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



**Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah**

Dalam Gambar 1.1. di atas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja mempedomani Renstra Perangkat Daerah (PD), untuk penyusunan Renja tahun 2025 maka berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang tahun 2025 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Selanjutnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tahun 2025.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 52);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15).
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 95);  
dan

- I. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 79).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. dan RKPD Kabupaten Ketapang tahun 2025.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kabupaten Ketapang tahun 2025 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tahun 2025.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG TAHUN LALU**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, analisis kinerja pelayanan Kabupaten Ketapang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG**

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tahun 2025.

##### **BAB V PENUTUP**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN**  
**SIPIL TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang**

Kualitas penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang yang disusun berdampak terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2021 – 2026.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Untuk penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2023. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang melaksanakan sebanyak 5 (lima) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD sebesar 8.858.907.378,- (*delapan milyar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah*) Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 7.809.575.719,- atau sebesar 88,16 %.

### **2.1.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2022-2026 dengan Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.**

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2022- 2026 sampai dengan Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang:
  - 1) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 5 (lima) Program dan 5 (lima) Indikator Kinerja Program serta 13 (tiga belas) Kegiatan dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan.
  - 2) Dari 4 (empat) Indikator Kinerja Program, terdapat 2 (dua) indikator yang melampaui target, 2 (dua) indikator sesuai target.
- b. Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2022- 2026 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:
  - 1) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 5 (lima) program dengan 5 (lima) indikator program dan 13 (tiga belas) kegiatan dengan 13 (tiga belas) indikator kegiatan.
  - 2) Dari 4 (empat) indikator kinerja program, terdapat 3 (tiga) indikator yang dapat melampaui target, dan 1 (satu) Indikator dapat memenuhi target akhir periode Renstra.
  - 3) Dari 4 (empat) indikator kinerja kegiatan, terdapat 3 (tiga) indikator yang diperkirakan telah memenuhi target Renstra, dan 1 (satu) indikator tidak dapat memenuhi Renstra.
- c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

#### **➤ Indikator Kinerja Utama Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan**

Berdasarkan hasil Capaian Realisasi tahun 2023, indikator kinerja utama kepemilikan dokumen kependudukan sudah melebihi target renstra akan tetapi target nasional nasional belum tercapai, hal ini disebabkan oleh :

- kurangnya animo masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan (khususnya KTP-EI)
- letak geografis tempat tinggal penduduk yang relatif jauh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, serta akses jalan yang sangat menyulitkan masyarakat menjangkau tempat pelayanan.
- Masih belum tersedianya jaringan internet yang merata diseluruh kecamatan. Dari 20 kecamatan, yang sudah memiliki alat rekam KTP-EI dan jaringan komunikasi data (jarkomdat) sebanyak 12 kecamatan (Kec. Marau, Manis Mata, Kendawangan, Sungai Laur, Simpang Hulu, Nanga Tayap, Matan Hilir Selatan, Hulu Sungai, Simpang Dua, Air Upas, Singkup dan Pemahan) selebihnya sebanyak 8 kecamatan (Kec. Delta Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Utara, Muara Pawan, Jelai Hulu, Sungai Melayu Rayak, Tumbang Titi dan Sandai) belum tersedia alat rekam KTP-EI dan jaringan komunikasi data (jarkomdat) sehingga mengharuskan penduduk untuk melakukan perekaman langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
- Masih kurangnya sarana prasarana pendukung berupa mobile perekaman yang sangat dibutuhkan untuk perekaman keliling KTP-EI dan alat perekaman KTP-EI.
- Kurangnya dana untuk melakukan Jemput Pola kepada Masyarakat yang di Kecamatan terjauh.

➤ ***Indikator Kinerja Utama Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil***

Meskipun capaian kepemilikan akta catatan sipil sudah melebihi target, akan tetapi masih saja terdapat kendala adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan penerbitan dokumen akta pencatatan sipil;
- 2) Masih adanya peristiwa kelahiran yang tidak dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
- 3) Adanya dokumen akta kelahiran BAKAK (Biodata Anak berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran) yang diterbitkan secara manual yang terbit pada Tahun 2009 kebawah dan belum tercatat dalam sistem aplikasi SIAK;
- 4) Masyarakat belum maksimal menggunakan pendaftaran pelayanan Dukcapil Online melalui Website <http://esiak.kabketapang> ;

➤ **Indikator Kinerja Utama Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan**

Meskipun pada indikator kinerja persentase PD yang memanfaatkan dokumen kependudukan sudah mencapai target restra, akan tetapi masih ada saja kendala yaitu sebagai berikut :

- 1) Dikarenakan adanya persetujuan dari Direktur Jenderal Disdukcapil terkait perijinan kerjasama pemanfaatan data kependudukan antara disdukcapil kab. Ketapang dengan perangkat daerah kab. Ketapang dan lembaga pengguna tentang.
- 2) Terbatasnya SDM pengelola secara kuantitas.
- 3) Dukungan anggaran yang tidak memadai.
- 4) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

➤ **Indikator Sasaran Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat**

Upaya yang dilakukan guna menunjang Indek Kepuasan Masyarakat yaitu dengan Meningkatkan 9 (sempilan) komponen pelayanan yang menjadi penilaian dalam menentukan Indek Kepuasan masyarakat, ada beberapa kendala yang sering ditemui dalam meningkatkan nilai kepuasan masyarakat antara lain :

- 1) Kurangnya animo masyarkat dalam pengisian koesioner maupun pengisian akngket ke dalam kotak kepuasan yang telah di sediakan pada ruang pelayanan.
- 2) Tidak adanya pelatihan/bimtek yang diberikan kepada operator dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

➤ **Indikator Kinerja Utama Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan**

Tidak terpenuhinya pencapaian kepemilikan dokumen kependudukan (perekaman KTP-el)

- **Indikator Kinerja Utama Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil**  
Tidak semua masyarakat dapat memenuhi kepemilikan dokumen akta capil (kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian).
- **Indikator Kinerja Utama Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan**  
OPD yang memanfaatkan data tidak serta merta dapat mengakses data meskipun sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- **Indikator Sasaran Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat**  
Indeks Kepuasan Masyarakat belum mencapai target restra PD.

e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan.

- **Indikator Kinerja Utama Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan**  
Kebijakan/tindakan yang diambil untuk meningkatkan tercapainya target yaitu dengan mengupayakan penambahan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana perekaman KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dan Kecamatan
- **Indikator Kinerja Utama Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil**  
Kebijakan/tindakan yang diambil untuk meningkatkan/mempertahankan target ralisasi yaitu dengan penambahan anggaran guna pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan rapat lintas sektor guna menjalin kerjasama dan penandatanganan MOU (Memorandum of Understanding) dengan pihak ke tiga.
- **Indikator Kinerja Utama Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan**  
Untuk meningkatkan/mempertahankan target realisasi, kebijakan/tindakan yang diambil yaitu dengan penambahan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pemanfaatan data oleh PD yang telah melakukan kerja sama.



➤ **Indikator Sasaran Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat**

Guan meningkatkan target realiasi yang belum sesuai dengan target renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kebijakan/tindakan yang diambil yaitu penambahan anggaran untuk melakukan jemput bola pada saat melakukan pelayanan adminduk ke desa dan desa terpencil, dan juga melakukan pelatihan/bimtek kepada seluruh operator yang memberikan layanan kepada masyarakat.

Berikut ini adalah tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

**Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Sampai dengan Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4)
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP-el								
2.12.02.2.01	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk								
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penduduk	Jumlah KTP-El yang diterbitkan	50000 Keping	34500 Keping	640000 Dok	60807 Dok	10%	30000 Dok	125307	31326,75
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penduduk Pindah Datang	1 Lap	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3	0,75

	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah KIA yang diterbitkan	23000 Keping	15120 Keping	20000 Lap	18198 Lap	91%	15000 Lap	48318	12079,5
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah KK yang diterbitkan	35000 Lbr	167603 Lbr	1 Dok	1 Dok	100%	14000 Lap	181604	45401
	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pelayanan Jemput Bola yang dilaksanakan	20 Kec	11 Kec	1000 Org	12158 Org	1216%	598931 Org	611100	152775
	Pengumpulan, Analisis dan Desiminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Laporan Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	12 Lap	8 Lap	12 Lap	8 Lap	67%	12 Lap	28	7
<b>2.12.02.2.03</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>								
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	0 0	0 0	0 0	0 0	0	20 Dok	20	5
<b>2.12.03</b>	<b>Program Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Kepemilikan Akta Perceraian</b>								
		<b>Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan</b>								
<b>2.12.03.2.01</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil</b>								
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Laporan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan	12 Kali	12 Kali	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	14	3,5
		Jumlah Pelayanan Jemput Bola yang dilaksanakan								
<b>2.12.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>								

	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Rapat yang difasilitasi	6 Dok 20 Kec	6 Dok 20 Kec	1 Lap	1 Lap	100%	12 Lap	19 20	4,75 5
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	0	0	0	0	0%	20 Dok	20	5
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan rujuk bagi Penduduk yang Beragama islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan rujuk bagi Penduduk yang Beragama islam	0	0	0	0	0%	1 Lap	1	0,25
	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	0	0	0	0	0%	20 Lap	20	5
2.12.04	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase Data Base Kependudukan yang Valid dan Update</b>								
2.12.04.2.01	<b>Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan</b>	<b>Persentase Terwujudnya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan</b>								

	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	2 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	2 Dok	4	1
<b>2.12.04.2.03</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>								
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengoperasian SIAK	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Lap	3	0,75
	Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan	12 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	12 Dok	14	3,5
<b>2.12.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan</b>	<b>Persentase Terwujudnya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base Kependudukan</b>								
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	92 Dok	8 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	14 Dok	24	6
	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Brosur Data Kependudukan	3000 Lbr	300 Lbr	1 Lap	1 Lap	100%	500 Lap	801	200,25
<b>2.12.04.2.03</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>								
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen dan Laporan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3	0,75

	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Lap	1 Lap	100%	2 Lap	4	1
	Kerjasama dengan organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dok	8 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	2 Dok	11	2,75
<b>2.12.05</b>	<b>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	<b>Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai ketentuan</b>								
<b>2.12.05.2.01</b>	<b>Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>Persentase Jumlah Data Profil Kependudukan</b>								
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Kependudukan	1 Buku	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3	0,75
<b>2.12.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Penatausahaan Administrasi Pemerintahan yang Terpenuhi</b>								
<b>2.12.01.2.01</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu</b>								
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja, Dokumen Evaluasi Rencana Aksi dan Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	60 Dok	19 Dok	19 Dok	19 Dok	100%	12 Lap	50	12,5
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja	20 Dok	2 Dok	5 Dok	5 Dok	100%	4 Dok	11	2,75
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan RKA Perubahan	10 Dok	1 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	5	1,25
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA dan DPPA	10 Dok	3 Dok	1 Dok	2 Dok	200%	2 Dok	7	1,75
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Jankin dan LKjIP, Kematangan Organisasi, LKPJ dan LPPD, PMPRB, Rencana Aksi dan SPIP	40 Dok	20 Dok	2 Lap	2 Lap	100%	11 Lap	33	8,25

<b>2.12.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Sesuai Standar yang ditetapkan</b>										
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	256 Org	33 Org	45 Org	33 Org	73%	42 Org	108	27		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan	60 Dok	12 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	12 Dok	25	6,25		
	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Dok	1 Dok	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	3	0,75		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	10 Dok	2 Dok	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	4	1		
<b>2.12.01.2.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah</b>										
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Kegiatan	0 -	0 -	0 -	0%	100 Org	100	25		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		300 Stel	0 -	80 Paket	80 Paket	100%		80	20		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0		100 Org	100	25		
<b>2.12.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terpenuhi</b>										
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	104 Jenis	16 Jenis	1 Paket	1 Paket	100%	11 Paket	28	7		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Baru Kantor	74 Unit	21 Unit	10 Paket	10 Paket	100%	10 Paket	41	10,25		
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor, Jumlah Makanan dan Minuman dan Jumlah Bahan Penanganan Covid-19	1975 Org	249 Org	5 Paket	5 Paket	100%	62 Paket	316	79		
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Pengandaan	30 Jenis	6 Jenis	10 Paket	10 Paket	100%	6 Paket	22	5,5		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Eksamplar Koran/Majalah dan Buku Perundang-Undangan	1306 Hari	32 exemplar	2 Dok	2 Dok	100%	250 Dok	284	71		

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah	636 Dok	11 Dok	5 Lap	5 Lap	100%	125 Lap	141	35,25
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen yang diarsipkan	264 Dok	1 Dok	10 Dok	10 Dok	100%	52800 Dok	52811	13202,75
	Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Bimtek (Go Digital)	5 Kali	1 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	1 Dok	4	1
<b>2.12.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>								
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	1 Unit	0 -	0 -	-	0 -	1	0,25
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Baru	171 Buah	1 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	17 Unit	23	5,75
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	45 Unit	5 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	7 Unit	13	3,25
<b>2.12.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai, Jumlah Surat dan Barang yang dikirim	527 Lbr	242 Lbr	5 Lap	5 Lap	100%	97 lap	344	86
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jaringan yang harus dibayar	15 Rek	4 Rek	12 Lap	12 Lap	100%	3 Lap	19	4,75
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang diperbaiki	175 Unit	21 Unit	1 Lap	1 Lap	100%	33 Lap	55	13,75
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	124 Jenis	20 Jenis	19 Lap	19 Lap	100%	19 Lap	58	14,5
<b>2.12.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Perizinan/Operasional Kendaraan Dinas selama setahun	167 Unit	28 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	29 Unit	69	17,25
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	167 Unit	11 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	29 Unit	52	13



	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0%	1 Unit	1	0,25
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	1.010 M2/Th	2 Paket	1 unit	1 Unit	100%		3	0,75

Sumber: Renstra Disdukcapil

## 2.1.2. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2. 2 Realisasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2023 (*Realisasi anggaran 2023*)**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen %
1	2	3	4	5
1 2 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.858.907.378,00	7.809.575.719,00	88,16
1 2 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.359.611.955,00	6.377.112.637,00	86,65
1 20 2 2 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.000.000,00	87.337.885,00	94,93
1 20 0 2 2 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	13.898.803,00	92,66
1 20 0 2 2 1 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.000.000,00	16.127.672,00	94,87
1 20 0 2 2 1 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000,00	19.153.500,00	95,77
2 1 20 0 2 1 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	13.678.790,00	91,19
1 20 0 2 2 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	24.479.120,00	97,92
1 20 2 2 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.840.752.196,00	3.916.440.140,00	80,91
1 20 0 2 2 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.780.838.000,00	3.863.092.594,00	80,80
1 20 0 2 2 2 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	25.000.000,00	21.307.791,00	85,23
1 20 0 2 2 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.914.196,00	19.343.505,00	97,13
2 1 20 0 2 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000,00	12.696.250,00	84,64
1 20 2 2 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.156.789,00	73.112.500,00	96,00
1 20 0 2 2 5 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	76.156.789,00	73.112.500,00	96,00
1 20 2 2 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.597.298.139,00	1.562.412.453,00	97,82
1 20 0 2 2 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	14.991.750,00	99,95
1 20 0 2 2 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.067.120.639,00	1.043.437.284,00	97,78
1 20 0 2 2 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.000.000,00	94.447.945,00	99,42

1	20	0							
2	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	19.987.954,00	99,94		
1	20	0		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	4.901.400,00	98,03		
2	2	6	6						
1	20	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	296.478.415,00	98,83		
2	2	6	9						
1	20	1		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	65.057.500,00	62.254.925,00	95,69		
2	2	6	0						
1	20	1		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.120.000,00	25.912.780,00	86,03		
2	2	6	1						
1	20			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>38.900.000,00</b>	<b>38.887.906,00</b>	<b>99,97</b>		
2	2	7							
1	20	0		Pengadaan Mebel	20.000.000,00	19.994.740,00	99,97		
2	2	7	5						
1	20	1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.900.000,00	18.893.166,00	99,96		
2	2	7	0						
1	20			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>431.684.719,00</b>	<b>419.817.386,00</b>	<b>97,25</b>		
2	2	8							
1	20	0		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	9.983.038,00	99,83		
2	2	8	1						
1	20	0		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	254.455.870,00	244.666.631,00	96,15		
2	2	8	2						
1	20	0		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	24.998.400,00	99,99		
2	2	8	3						
1	20	0		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.228.849,00	140.169.317,00	98,55		
2	2	8	4						
1	20			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>282.820.112,00</b>	<b>279.104.367,00</b>	<b>98,69</b>		
2	2	9							
2	1	20	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.816.000,00	11.615.400,00	78,40		
2	2	9	1						
2	1	20	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	208.004.112,00	208.000.406,00	100,00		
2	2	9	2						
1	20	0		Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00	59.488.561,00	99,15		
2	2	9	9						
1				<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>587.484.532,00</b>	<b>580.419.150,00</b>	<b>98,80</b>		
2	2								
1	20			<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>587.484.532,00</b>	<b>580.419.150,00</b>	<b>98,80</b>		
2	2	1							
2	1	20	0	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	30.000.000,00	29.796.500,00	99,32		
2	2	1	1						
2	1	20	0	Pencatatan, Penatusahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	30.000.000,00	29.674.150,00	98,91		
2	2	1	2						
1	20	0		Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	220.000.000,00	217.862.420,00	99,03		
2	2	1	3						
2	1	20	0	Pencatatan, Penatusahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	150.427.104,00	149.327.410,00	99,27		
2	2	1	5						
1	20	0		Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	122.057.428,00	120.289.870,00	98,55		
2	2	1	7						
2	1	20	0	Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	35.000.000,00	33.468.800,00	95,63		
2	2	1	8						
1				<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>670.001.280,00</b>	<b>624.228.587,00</b>	<b>93,17</b>		
2	2								
1	20			<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>470.001.280,00</b>	<b>441.317.042,00</b>	<b>93,90</b>		
2	2	1							
2	1	20	0	Pencatatan, Penatusahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	470.001.280,00	441.317.042,00	93,90		
2	2	1	1						
1	20			<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>182.911.545,00</b>	<b>91,46</b>		
2	2	2							
1	20	0		Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil	200.000.000,00	182.911.545,00	91,46		
2	2	2	6						
2	1			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFOMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>221.809.611,00</b>	<b>207.911.625,00</b>	<b>93,73</b>		
2	2								
2	1	20		<b>Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>86.009.611,00</b>	<b>80.420.575,00</b>	<b>93,50</b>		
2	2	1							
2	1	20	0	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan					

2	1	1		58.420.000,00	55.969.100,00	95,80	
1	20	0					
2	2	1	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	15.000.000,00	13.674.000,00	91,16
1	20	0		Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	12.589.611,00	10.777.475,00	85,61
2	2	1	3				
1	20			<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>135.800.000,00</b>	<b>127.491.050,00</b>	<b>93,88</b>
2	2	3					
1	20	0		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi/Administrasi Kependudukan	25.000.000,00	22.732.800,00	90,93
2	2	3	3				
1	20	0		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	55.800.000,00	53.206.380,00	95,35
2	2	3	4				
1	20	0		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.000.000,00	12.219.370,00	81,46
2	2	3	5				
1	20	0		Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	15.000.000,00	14.733.000,00	98,22
2	2	3	6				
2	1	20	0	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan	25.000.000,00	24.599.500,00	98,40
2	2	3	8				
1				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>19.903.720,00</b>	<b>99,52</b>
2	2						
1	20			<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>19.903.720,00</b>	<b>99,52</b>
2	2	1					
2	1	20	0	Penyusunan Profil Data Perkembangan Dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain	20.000.000,00	19.903.720,00	99,52
2	2	1	2				
				<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>8.858.907.378,00</b>	<b>7.809.575.719,00</b>	<b>88,16</b>

Sumber: Laporan Realisasi Fisik Ta. 2023 Disdukcapil

Berdasarkan data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 5 (lima) program dan 13 (tiga) kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang adalah sebesar Rp. **8.858.907.378,00** Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp **7.809.575.719,00** (88,16%) dengan sisa sebesar Rp 1.049.331.659,00 (11,84%).

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang

Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana Mandatori dari Pemerintah Pusat. Peran Pemerintah Daerah terkait dukungan Anggaran APBD dalam kegiatan Adminduk adalah Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sehingga harus dikerjakan dan wajib di dukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dan pemerintah Daerah Provinsi. Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sistem Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Dalam melakukan

analisis terhadap kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Sampai Dengan Tahun 2023**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Kinerja		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan			74,33	74,6	75,67	76,33	76,29	0	92,51	91,71	
	Perekaman KTP Elektronik	99,3	86,67	95%	95%	96%	96%	89,02				
	Persentase kepemilikan dokumen KIA	40	40,06	32%	33%	34%	35%	39,96				
	Persentase kepemilikan dokumen KK	100		96%	96%	97%	98%	99,89				
2	Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil	95		88	89,5	92	93,5	98,5	0	76,09	74,87	
	persentase kepemilikan akta kematian	100	100	85%	87%	90%	92%	100%				Persentase di Peroleh berdasarkan Jumlah Permohonan Masuk
	Persentase kepemilikan akta kelahiran	100	100	97%	97%	98%	98%	100%				
	Persentase kepemilikan akta perceraian	100	100	85%	87%	90%	92%	100%				
	Persentase kepemilikan akta perkawinan	100	100	85%	87%	90%	92%	100%				
3	Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan		79,17	67%	78%	89%	100%	81,25	0	78,65	70	
4	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat			91	92	93	94	81,31	0	75,27	74,47	

Sumber: Renstra Th 2021-2026, LPPD Th 2023 dan Lkji PTh. 2023

Dari data Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sampai dengan tahun 2023 dapat dianalisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Letak geografis tempat tinggal penduduk yang relatif jauh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, serta akses jalan yang sangat menyulitkan masyarakat menjangkau tempat pelayanan.
2. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung berupa mobile perekaman yang sangat dibutuhkan untuk perekaman keliling KTP-EI serta alat perekaman KTP-EI.
3. Masih adanya peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian yang tidak dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
4. Terbatasnya SDM pengelola secara kuantitas.
5. Dukungan anggaran yang tidak memadai sehingga menyulitkan dalam melakukan mencapai target yang telah ditetapkan.

Pemerintah Daerah diminta memberikan perhatian lebih pada layanan administrasi kependudukan (Adminduk), di Daerah sebagai mana pelayanan Adminduk adalah MANDATORI dari Pemerintah Pusat. Peran Pemerintah Daerah terkait dukungan Anggaran APBD dalam Kegiatan Adminduk adalah Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sehingga harus dikerjakan dan wajib di dukung Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dan pemerintah Daerah guna menunjang Visi, Misi dan IKU Kepala Daerah.

### **2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang**

Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi sebagai pelayan masyarakat adalah sebagai berikut.

- a. Masih belum tersedianya jaringan internet yang merata diseluruh kecamatan. Dari 20 kecamatan, yang sudah memiliki alat rekam KTP-EI baru dan jaringan komunikasi data (jarkomdat) Kecamatan Pemahan, untuk kecamatan lain seperti manis mata, airupas, singkup, marau, Kendawangan, MHS, sungai Laur, SP2 dan SP hulu barang dengan kondisi tidak baik namun bisa berfungsi untuk waktu tidak lama dan selalu dimonitor dan dilakukan perbaikan dan (Kanibalisasi). Hal tersebut mengharuskan penduduk untuk melakukan perekaman langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.
- b. Adanya dokumen akta kelahiran BAKAK (Biodata Anak berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran) yang diterbitkan secara manual yang terbit pada Tahun 2009 kebawah dan belum tercatat dalam sistem aplikasi SIAK;
- c. Masyarakat belum maksimal menggunakan pendaftaran pelayanan Dukcapil Online melalui Website <http://esiak.kabketapang> ;

Permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian Visi, Misi dan IKU Kepala Daerah. Karena itu ke depan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian Visi dan Misi dan IKU Kepala Daerah. Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

- 1) Luasnya kondisi geografis dan terpencar
- 2) Belum banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya dokumen kependudukan
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan
- 4) Tingkatkan kualitas dan kuantitas SDM

b. Peluang

- 1) Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
- 2) Jaringan komunikasi data masih perlu dioptimalkan dalam topologi dan penataannya, baik itu dalam internal Dukcapil maupun dari Dukcapil ke luar
- 3) Mengembangkan kinerja aparatur dinas dalam pelayanan Administrasi Kependudukan.



Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sebagai berikut:

- a. Meningkatkan alokasi anggaran Administrasi Kependudukan untuk mencapai pelayanan prima.
- b. Tingkatkan peran serta masyarakat dalam sosialisasi program Administrasi Kependudukan dan Pentingnya Dokumen Kependudukan.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**

Penyusunan RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026, serta RKP Tahun 2025. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2025 adalah “**Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Upaya Penguatan Ekonomi Daerah**” dengan 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1 : Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial;
- b. Prioritas Daerah 2 : Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Dasar;
- c. Prioritas Daerah 3 : Memperkuat Produktivitas Tenaga Kerja dan Pengembangan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah ;
- d. Prioritas Daerah 4 : Mewujudkan Pemenuhan Infrastruktur Penunjang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan;
- e. Prioritas Daerah 5 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ketapang tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 7,51 persen
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,36
- c. Angka kemiskinan sebesar 9,4 persen
- d. tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,6 persen

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang mendukung pencapaian prioritas 5 (lima), yaitu **“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan”**. Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel 2.4 berikut.

**Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2025  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator/kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Disdukcapil			Rp 850.000.000	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Disdukcapil			Rp 595.200.000	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	96%	Rp 680.000.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	96%	Rp 454.100.000	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	96%	Rp 170.000.000	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	96%	Rp 141.100.000	
2	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Disdukcapil			Rp 550.000.000	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Disdukcapil			Rp 407.200.000	
	Pelayanan Pencatatan Sipil		Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	90%	Rp 250.000.000	Pelayanan Pencatatan Sipil		Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	90%	Rp 250.000.000	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	90%	Rp 300.000.000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	90%	Rp 157.200.000	
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Disdukcapil			Rp 625.000.000	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Disdukcapil			Rp 528.400.000	

	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	90%	Rp 260.000.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	90%	Rp 250.000.000	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	90%	Rp 365.000.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	90%	Rp 278.400.000	
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Disdukcapil</b>			<b>Rp 100.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Disdukcapil</b>			<b>Rp 61.567.436</b>	
	Penyusunan Profil Kependudukan		Persentase Jumlah Data Penyusunan Profil Kependudukan	100%	Rp 100.000.000	Penyusunan Profil Kependudukan		Persentase Jumlah Data Penyusunan Profil Kependudukan	100%	Rp 61.567.436	
5	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Disdukcapil</b>			<b>Rp 10.744.855.624</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Disdukcapil</b>			<b>Rp 8.977.686.535</b>	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 350.551.285	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 269.200.001	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 6.524.804.339	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 5.169.435.249	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 134.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 30.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 2.265.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 1.633.800.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 530.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 640.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 495.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 1.044.200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 445.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 191.051.285	

Rancangan awal RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2025 sudah sesuai dengan Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025,.

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait. Khusus untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Ketapang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 2. 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang**

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disdukcapil	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	Pembelian Alat Perekaman KTP-el untuk Kecamatan

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG**

### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2026 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan nasional tahun 2025 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2025-2029.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang**

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026. Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tersebut, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2025, yaitu:

**“Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.”**

dengan indikator tujuan “Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan”**, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Kependudukan;
- b. Rata-Rata Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil;
- c. Persentase OPD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan;
- d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2021- 2026 yaitu sebagaimana tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3. 1 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2025**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2025
1	2	3	4	5
Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	75,67%
		Persentase Kepemilikan Akta Catatan Sipil	Persen	92,00%
		Persentase PD yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan	Persen	89,00%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	93

Sumber : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2021 – 2026.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai dasar penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang



Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun untuk penyusunan Program, Kegiatan, Sub kegiatan pada tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

- a. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tahun 2025 adalah sebanyak 5 (lima) program, yang terdiri:
  - 1) Program Pendaftaran Penduduk
  - 2) Program Pencatatan Sipil
  - 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - 4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
  - 5) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- b. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tahun 2025 adalah sebanyak 16 (enam belas) kegiatan, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan penunjang, dan 7 (tujuh) kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- c. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tahun 2025 adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) sub kegiatan, yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan penunjang, dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .;

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tahun 2025 disertai indikator kinerja tersaji pada tabel berikut.

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
X					URUSAN .....		
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG .....		
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
X	XX	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
X	XX	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan
X	XX	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan
X	XX	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
X	XX	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan
X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
X	XX	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
X	XX	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen
X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
X	XX	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
X	XX	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
X	XX	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan
X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
X	XX	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit
X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
1	01	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		
1	01	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
1	01	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen
2	12	02	201	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen
2	12	02	201	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Orang
2	12	02	201	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
					Kependudukan		
2	12	02	201	07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan
2	12	02	201	08	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	Dokumen
2	12	02	203		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		
2	12	02	203	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
2	12	03	201		Pelayanan Pencatatan Sipil		
2	12	03	201	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen
2	12	03	201	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan
2	12	03	202		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
2	12	03	202	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan
2	12	03	202	03	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan
2	12	03	202	06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
2	12	04	201		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		
2	12	04	201	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen
2	12	04	201	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen
2	12	04	201	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan
2	12	04	203		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
2	12	04	203	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan
2	12	04	203	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen
2	12	04	203	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan
2	12	04	203	06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dokumen
2	12	04	203	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		
2	12	05	201		Penyusunan Profil Kependudukan		
2	12	05	201	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	12	05	201	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
					Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN**  
**PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG**

Berdasarkan analisa kebutuhan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tahun 2025 menetapkan 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sesuai dengan tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka secara garis besar proyeksi total kebutuhan anggaran adalah sebesar Rp 10.570.053.971,-, yang terdiri dari:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebesar	Rp.	8.977.686.535
b. Program Pendaftaran Penduduk, sebesar	Rp.	595.200.000
c. Program Pencatatan Sipil, sebesar	Rp.	407.200.000
d. Program Pengelolaan Informasi Administrai Kependudukan, Sebesar	Rp.	528.400.000
e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, sebesar	Rp.	61.567.436

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tahun 2025 yang menampilkan rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan rencana anggaran beserta prakiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.



**Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				10.570.053.971				12.528.200.000
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	MENINGKATNYA KUALITAS PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KAB. KETAPANG		8.977.686.535	APBD			10.504.700.000
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat waktu	Disdukcapil	100 %	269.200.001		IKM Dinas	100 %	341.000.000
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dok	74.200.001			5 Dok	77.000.000

2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2	Dok	20.000.000			2	Dok	27.500.000
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2	Dok	20.000.000			2	Dok	27.500.000
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2	Dok	20.000.000			11	Dok	27.500.000
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2	Dok	25.000.000			12	Dok	27.500.000
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		8	Lap	55.000.000			8	Lap	77.000.000
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5	Lap	55.000.000			5	Lap	77.000.000
<b>2.12.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Disudicapil</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>5.169.435.249</b>					<b>6.148.500.000</b>
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		45	Org	5.034.435.249			45	Org	6.000.000.000

2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	Dok	35.000.000			12	Dok	38.500.000
2.12.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		26	Dok	25.000.000			26	Dok	27.500.000
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	Lap	25.000.000			1	Lap	27.500.000
2.12.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		16	Dok	25.000.000			16	Dok	27.500.000
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2	Lap	25.000.000			2	Lap	27.500.000
<b>2.12.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tersediannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Disdukcapil</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>30.000000</b>			<b>100</b>	<b>%</b>	<b>165.000.000</b>
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		100	Org	20.000.000			100	Org	55.000.000
<b>2.12.01.2.05.11</b>	<b>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</b>	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		100	Org	10.000.000			1	Keg	110.000.000

<b>2.12.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terpenuhi</b>	<b>Disdukcapil</b>	<b>100 %</b>	<b>1.633.800.000</b>			<b>100 %</b>	<b>2.170.700.000</b>
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	32.000.000			1 paket	35.200.000
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6 Paket	1.126.800.000			10 Unit	1.705.000.000
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		62 Paket	55.000.000			62 Jenis	50.000.000
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		6 Paket	80.000.000			6 Jenis	100.000.000
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dok	5.000.000			2 Dok	5.500.000
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		125 Dok	200.000.000			125 Dok	165.000.000
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		52.800 Dok	35.000.000			52.800 Dok	55.000.000
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Dok	100.000.000			1 Dok	55.000.000

<b>2.12.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Disukupil</b>	<b>100 %</b>	<b>640.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>869.000.000</b>
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		1 Unit	500.000.000		<b>Mbl Operasional</b>	1 Unit	550.000.000
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		17 Unit	30.000.000			17 Unit	33.000.000
2.12.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	50.000.000			1 Unit	220.000.000
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		7 Unit	60.000.000			7 Unit	66.000.000
<b>2.12.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Disukupil</b>	<b>100 %</b>	<b>495.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>544.500.000</b>
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		97 Lap	20.000.000			97 Lap	22.000.000

2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Lap	215.000.000			3 Lap	236.500.000
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		33 Lap	66.000.000			33 Lap	100.000.000
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		19 Lap	743.200.000			19 Lap	121.000.000
<b>2.12.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Disdukcapil</b>	<b>100 %</b>	<b>191.051.285</b>			<b>100 %</b>	<b>331.000.000</b>
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		29 Unit	20.000.000			29 Unit	22.000.000
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		29 Unit	120.000.000			29 Unit	209.000.000

2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	51.051.285			1 Unit	100.000.000
<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>PERSENTASI CAKUPAN PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Kab. Ketapang</b>		<b>595.200.000</b>	<b>APBD</b>			<b>794.000.000</b>
<b>2.12.02.2.01</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Disdukcabil</b>	100 %	<b>454.100.000</b>			100 %	<b>607.000.000</b>
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		30.000 Keping	50.000.000			30.000 Keping	55.000.000
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		1 Dok	50.000.000			1 Lap	55.000.000
2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk		599.950 Org	192.100.000			15.000 Keping	220.000.000
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		30.000 Dok	42.000.000			14.000 Lbr	100.000.000

2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		1600 0 Lap	50.000.000		<b>Perekaman Ke 20 Kec</b>	20 Kec	100.000.000
2.12.02.2.01.07	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk		12 Dok	70.000.000			12 Lap	77.000.000
<b>2.12.02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	<b>Disudicapil</b>		141.100.000				187.000.000
2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		20 Dok	141.100.000			20 Dok	187.000.000
<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>PERSENTASE CAKUPAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>KAB. KETAPANG</b>		<b>407.200.000</b>	<b>APBD</b>			<b>475.000.000</b>
<b>2.12.03.01</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Disudicapil</b>	<b>100 %</b>	<b>250.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>275.000.000</b>
<b>2.12.03.01.01</b>	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		20 Dok	200.000.000			20 Kec	220.000.000



2.12.03.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		6 Layan nan	50.000.000			6 Layan an	55.000.000
2.12.03.02	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Disdukcapil</b>	<b>100 %</b>	<b>157.200.000</b>			<b>100 %</b>	<b>200.000.000</b>
2.12.03.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		1 Lap	50.000.000			1 Lap	55.000.000
2.12.03.02.03	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil		20 Lap	50.000.000			20 Lap	55.000.000
2.12.03.02.06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil		20 Lap	57.200.000			12 Kali	90.000.000
2.12.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>PERSENTASE PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>KAB. KETAPANG</b>		<b>528.400.000</b>	<b>APBD</b>			<b>666.500.000</b>

2.12.04.01	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Persentase Data Profil Kependudukan</b>	<b>Disdukcapil</b>	<b>100 %</b>	<b>250.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>286.000.000</b>
2.12.04.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		2 Dok	60.000.000			2 Dok	65.000.000
2.12.04.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		14 Dok	95.000.000		<b>Kerjasama dgn pihak terkait</b>	14 Dok	110.000.000
2.12.04.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah		500 Lap	95.000.000			500 Lbr	110.000.000
<b>2.12.04.03</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Disdukcapil</b>	<b>100 %</b>	<b>278.400.000</b>		<b>Perbaikan Alat rekam</b>	<b>100 %</b>	<b>381.500.000</b>
2.12.04.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1 Lap	55.000.000			1 Dok	60.500.000
2.12.04.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		1 Dok	39.200.000			1 Dok	88.000.000
2.12.04.03.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		2 Lap	59.600.000			2 Kegiatan	88.000.000

2.12.04.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi		2 Dok	50.000.000			2 Dok	55.000.000
2.12.04.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan		12 Dok	74.600.000			12 Lap	90.000.000
<b>2.12.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>PERSENTASI JUMLAH DATA PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>KAB. KETAPANG</b>		<b>61.567.436</b>	<b>APBD</b>			<b>88.000.000</b>
<b>2.12.05.01</b>	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>Persentase Jumlah Data Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>Disdukcapil</b>	<b>100 %</b>	<b>61.567.436</b>			<b>100 %</b>	<b>88.000.000</b>
2.12.05.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota		3 Dok	31.567.436			3 Dok	44.000.000
2.12.05.01.02	Penyusunan Profil Data dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang Lain		1 Dok	30.000.000			1 Dok	44.000.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### **a. Catatan Penting**

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2025 antara lain:

- 1) Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 2) Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026, di mana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .;
- 3) Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

## **b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan Dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2025 ini memuat antara lain :

- 1) Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2025;
- 2) Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Ketapang;
- 3) Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2025.

## **c. Rencana Tindak Lanjut**

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2025 untuk setiap triwulannya.
- 2) Program dan kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.
- 3) Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Ketapang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada Tahun Anggaran 2025.

Ketapang, Juli 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KAB. KETAPANG**



**D. E. R. S. I. S. H., M. A. P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650815 199903 1 003